

**PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN PADA
PELAKSANAAN PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH OLEH DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Studi di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling)**

Yaumil Aziizah Alansa, Bimantara Nur Alim

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 1, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pembangunan Keberlanjutan pada Pelaksanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling).

Pengarang : Yaumil Aziizah Alansa

NIM : 2202016005

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 8 Mei 2026

Pembimbing,



Bimantara Nur Alim S.IAN., M.KP.

NIP 19960807 202406 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 14
---------------	-------------

Nomor	: 1
--------------	------------

Tahun	: 2026
--------------	---------------

Halaman	: 1-14
----------------	---------------

PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN PADA PELAKSANAAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Studi di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling)

Yaumil Aziizah Alansa ¹, Bimantara Nur Alim ²

Abstrak

Penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Dama masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang layak dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan keberlanjutan pada pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari pihak pemerintah, kelurahan, dan masyarakat yang didukung oleh regulasi serta laporan dari instansi pemerintah. Dalam menentukan sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana teknik purposive sampling ini menentukan informan yang dianggap mengetahui tentang Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling Kota Samarinda. Adapun analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Dama berdasarkan lima indikator SDG dari UN-Habitat belum sepenuhnya memenuhi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Dalam pengelolaan tersebut masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni Keterbatasan anggaran, kendala teknis pelaksanaan pembangunan, kurangnya kooperatif dan resistensi sosial dari masyarakat, dan kendala administratif dalam verifikasi dan validasi penerima bantuan

Kata Kunci : *Pembangunan Keberlanjutan, Permukiman Kumuh, Sungai Dama*

Pendahuluan

Permukiman merupakan ekosistem terpadu yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar, fasilitas publik, dan peluang ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yaumilaziizah1210@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rahayu & Jaharuddin, 2020). Pembangunan permukiman perlu memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik guna menciptakan kehidupan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan kota yang tidak terkendali dan perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan degradasi kualitas permukiman hingga menjadi kumuh, yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, kualitas hunian yang rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas hidup dan munculnya berbagai permasalahan sosial.

Kebaharuan penelitian terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas tingkat kekumuhan, strategi, peran, fungsi, maupun pola interaksi dalam penanganan permukiman kumuh, tetapi juga mengaitkannya dengan perspektif pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan indikator Metadata SDG oleh UN-Habitat untuk menganalisis pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Samarinda, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek fisik permukiman, tetapi juga menganalisis pemenuhan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pelaksanaan penanganannya. Maka dari itu, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai kelayakan permukiman dan keberlanjutan penanganan kawasan kumuh.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permukiman kumuh pada umumnya dipahami sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni yang ditandai oleh ketidakteraturan bangunan, kepadatan penduduk yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi standar (Hidayat, 2021). Kondisi ini umumnya disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan dan infrastruktur yang memadai, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan permukiman (Zahra & Yulyana, 2025). Selain itu, faktor keterbatasan lahan perkotaan, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, tingkat pendidikan, serta lemahnya pengelolaan tata ruang turut memperparah terbentuknya kawasan permukiman kumuh (Ponto et al., 2022). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa permukiman kumuh dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial ekonomi, dan urbanisasi, serta telah ditangani melalui berbagai strategi seperti perbaikan infrastruktur dan revitalisasi kawasan. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek fisik dan implementasi program, sehingga belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan penanganan permukiman kumuh dengan perspektif pembangunan berkelanjutan.

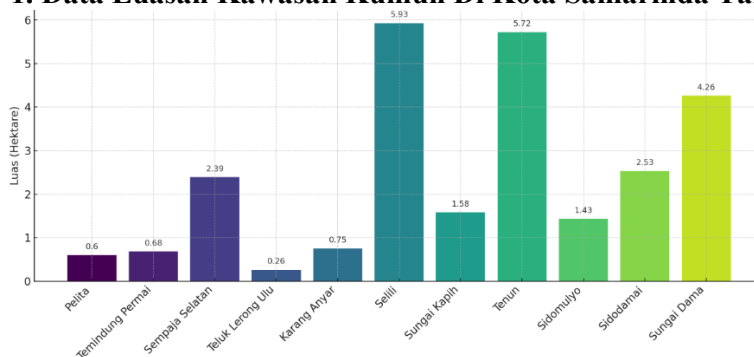
Kondisi lingkungan perkotaan sangat dipengaruhi oleh pola pertumbuhan permukiman yang tercermin dari distribusi penduduk, yaitu terpusat, menyebar, dan memanjang. Dalam perkembangannya, permukiman di perkotaan, khususnya permukiman liar, sering kali menunjukkan karakteristik kumuh seperti kepadatan tinggi, ruang hidup yang sempit, serta lokasi yang tidak sesuai peruntukan, misalnya di bantaran sungai atau bawah jembatan (Putri dkk, 2023). Munculnya

permukiman kumuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tata ruang yang kurang baik, kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, permasalahan status lahan, serta pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan (Krisandriyana dkk, 2019). Permasalahan ini memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah, dan di Kota Samarinda sendiri, kawasan permukiman kumuh menjadi isu penting yang perlu mendapat prioritas penanganan dari pemerintah, terutama dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kota Samarinda menghadapi permasalahan permukiman kumuh yang cukup serius, ditandai dengan masih adanya sekitar 21 ribu penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni atau sekitar 2,44% rumah tangga perkotaan, yang umumnya berada di kawasan dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan infrastruktur. Kondisi ini diperparah oleh menurunnya kualitas lingkungan, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, tingginya urbanisasi, pertumbuhan penduduk yang pesat, keterbatasan lahan, serta mahalnya harga tanah dan hunian turut mendorong munculnya permukiman kumuh, sehingga diperlukan upaya kolaboratif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan kawasan permukiman kumuh melalui SK Wali Kota tahun 2018 seluas 133,33 hektar dan menindaklanjutinya melalui Rencana Pengurangan Kawasan Kumuh guna mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs 11). Upaya tersebut menunjukkan hasil dengan adanya penurunan luas kawasan kumuh dari 539,1 hektar pada 2015 menjadi 26,16 hektar pada 2024, meskipun penanganannya masih menghadapi berbagai kendala dan belum merata di seluruh wilayah. Beberapa kawasan seperti Kelurahan Selili, Tenun, dan Sungai Dama masih memiliki tingkat kekumuhan yang tinggi, dengan intervensi yang belum optimal.

Gambar 1. Data Luasan Kawasan Kumuh Di Kota Samarinda Tahun 2024



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda (2024)

Kawasan Steling, khususnya Kelurahan Sungai Dama, masih menghadapi berbagai permasalahan permukiman kumuh seperti keterbatasan prasarana proteksi kebakaran, drainase yang belum memadai, serta ketidakteraturan bangunan yang meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan longsor, sehingga dikategorikan sebagai kawasan kumuh ringan. Meskipun telah terjadi penurunan luas kawasan kumuh dari 10,85 hektar pada 2020 menjadi 4,26 hektar pada 2023, kondisi pada 2024 cenderung stagnan dan masih menyisakan beberapa RT dalam kategori kumuh, dengan berbagai permasalahan seperti kepadatan hunian, keterbatasan akses air bersih, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta risiko kebakaran akibat kondisi bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh, sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Data Luasan Kumuh Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda

Tahun	Luas Kumuh	Luas Kumuh Tertangani	RT Yang Tertangani	Keterangan
2020	10,85 (Luas Awal)	10,85 (Luas Awal)	RT 06,07,08,17,19,24,28,29,30,31, 32,33	Data Dasar Luasan Kumuh
2021	7,13	3,72	RT 08,28,29,30	Penanganan Tahap Awal
2022	5,4	1,73	RT 6,32	Penanganan Berlanjut
2023	4,26	1,10	RT 17, 24	Penanganan Kelanjutan

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda (2024)

Sustainable Development Goals (SDGs) ke-11 menargetkan terwujudnya permukiman yang berkelanjutan, inklusif, aman, dan tangguh, dengan penekanan pada akses hunian layak (target 11.1) serta perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatif dan terpadu (target 11.3). Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pencapaian tujuan tersebut harus didukung oleh keterpaduan tiga dimensi utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan (Rosana, 2018). Dimensi ekonomi berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan, dimensi sosial pada pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup, serta dimensi lingkungan pada keberlanjutan ekosistem (Purba et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara konsep dan realitas, yang menunjukkan bahwa pemenuhan ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan serta pencapaian target SDGs 11 belum sepenuhnya optimal. Meskipun berbagai upaya penanganan telah dilakukan, kajian yang mengintegrasikan indikator permukiman kumuh dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis SDGs 11.1.1 masih terbatas, khususnya

dalam melihat keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan (United Nation, 2021).

Penelitian ini mengkaji penanganan kawasan permukiman kumuh secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada lima indikator SDG 11.1.1 dari UN-Habitat, yaitu keamanan kepemilikan, akses air minum layak, akses sanitasi layak, kualitas struktural hunian, dan kepadatan hunian. Analisis tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan penanganan kawasan kumuh telah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji pembangunan berkelanjutan pada pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling.

Kerangka Dasar Teori

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan cabang dari administrasi publik yang berperan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Subandi et al., 2025). Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dalam konteks pembangunan, administrasi menjadi instrumen utama bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, serta mengimplementasikan program pembangunan secara efektif dan efisien.

Menurut Haryanti et al., (2024), administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Sementara itu, Siagian (1983) dalam Setiawan (2019) menyatakan bahwa administrasi pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terencana dan terarah oleh pemerintah untuk mengendalikan serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, administrasi pembangunan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga mencakup upaya pengorganisasian, pengelolaan, dan koordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki negara agar dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mencapai tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan (Subandi et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, keberhasilan administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat, efektivitas implementasi program, serta tingkat partisipasi masyarakat (Sartika et al., 2025). Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting karena pembangunan yang efektif harus berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Rahadian, 2016). Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dimensi sosial berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dimensi ekonomi berfokus pada pertumbuhan yang produktif dan berkelanjutan, sedangkan dimensi lingkungan menekankan pada pelestarian ekosistem serta pengelolaan sumber daya alam secara bijak (Purba et al., 2025). Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara seimbang agar pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan secara utuh.

Dalam konteks global, pembangunan berkelanjutan diimplementasikan melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai agenda pembangunan dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kemiskinan, lingkungan, dan permukiman. Salah satu tujuan yang relevan dengan penelitian ini adalah tujuan ke-11, yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target 11.1 secara khusus menekankan pentingnya akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh (Marlina, 2025). Dengan demikian, penanganan permukiman kumuh menjadi bagian penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor perkotaan.

Untuk mengukur capaian target tersebut, UN-Habitat mengembangkan indikator SDGs 11.1.1 yang digunakan untuk menilai kondisi permukiman kumuh. Indikator ini mencakup lima aspek utama, yaitu:

1. Keamanan Kepemilikan (*Security Of Tenure*)
Berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tempat tinggal.
2. Akses Terhadap Air Minum Layak (*Access To Improved Water*)
Menunjukkan ketersediaan dan keterjangkauan air bersih bagi masyarakat.
3. Akses Terhadap Sanitasi Layak (*Access To Improved Sanitation*)
Mencerminkan kondisi fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan.
4. Kualitas Struktural Perumahan (*Structural Quality/Durability Of Dwellings*)
Berkaitan dengan kondisi fisik bangunan dan ketahanannya terhadap berbagai risiko.
5. Kepadatan Hunian (*Sufficient Living Area/Overcrowding*)

Mengukur tingkat kelayakan ruang hunian berdasarkan jumlah penghuni.

Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang muncul akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan, dan kemampuan penyediaan hunian yang layak (Agus S Sadana, 2014). Permukiman pada dasarnya merupakan lingkungan tempat tinggal yang berfungsi tidak hanya sebagai hunian, tetapi juga sebagai ruang sosial bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Namun, ketika kualitas permukiman tidak memenuhi standar kelayakan, maka kondisi tersebut dapat berkembang menjadi permukiman kumuh (Joenso & Sari, 2020).

Permukiman kumuh umumnya ditandai dengan kondisi fisik bangunan yang tidak layak, kepadatan hunian yang tinggi, tata ruang yang tidak teratur, serta keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana dasar seperti air bersih dan sanitasi. Selain itu, kawasan permukiman kumuh juga seringkali berada di lokasi yang rawan terhadap bencana, seperti daerah bantaran sungai atau lereng yang rentan longsor, sehingga meningkatkan risiko bagi penghuninya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Dalam konteks pembangunan, permukiman kumuh menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kehidupan masyarakat perkotaan (Nurchaya, 2025). Keberadaan kawasan kumuh menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam akses terhadap hunian yang layak dan layanan dasar. Oleh karena itu, penanganan permukiman kumuh menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proyek ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang menghambat pembangunan berkelanjutan pada pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling. Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan-informan penting, termasuk Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda dan Lurah Kelurahan Sungai Dama. Data tambahan diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Samarinda yang menangani pelaksanaan, staf Kelurahan Sungai Dama, dan masyarakat yang bermukim di Kelurahan Sungai Dama. Studi lapangan dilakukan melalui teknik pencatatan, wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan, serta observasi langsung di lokasi kajian. Informan kunci dipilih dengan memilih mereka yang

memiliki pengetahuan dan wawasan yang relevan dengan masalah penelitian. Data sekunder dilakukan dengan studi perpustakaan, yaitu menelaah berbagai referensi berupa buku maupun artikel ilmiah. Kemudian didukung dengan sumber lain seperti arsip, laporan, serta hasil penelusuran dokumen di internet yang relevan dengan topik yang dikaji. Adapun analisis data berdasarkan Miles et al., (2014) yang terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembangunan Berkelanjutan Pada Pelaksanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Kelurahan Pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh dipahami sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kekumuhan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan penanganan tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Analisis pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam penelitian ini mengacu pada indikator SDG 11.1.1 yang dikembangkan oleh UN-Habitat, yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu kelayakan hunian, akses terhadap air bersih, sanitasi, kualitas bangunan, kepadatan hunian, serta keamanan bermukim.

A. Keamanan Kepemilikan (*Security of Tenure*)

Kepastian hak atas tanah merupakan aspek penting yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menempati hunian, sekaligus mencegah pengusiran, intimidasi, maupun ancaman lainnya. Kepemilikan yang didukung oleh bukti legal serta pengakuan *de facto* menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam bermukim. Secara konseptual, keamanan hak atas tanah juga berperan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup, karena masyarakat menjadi lebih terdorong untuk berinvestasi pada hunian dan lingkungannya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, aspek ini berkaitan dengan indikator SDGs 11.1.1, di mana ketidakpastian status tanah menjadi salah satu ciri utama permukiman kumuh, sehingga kepastian kepemilikan menjadi elemen penting dalam memahami dan mengatasi permasalahan tersebut.

Di Kelurahan Sungai Dama, kepastian kepemilikan tanah menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program bedah rumah oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, guna memastikan tidak timbul masalah hukum di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga menentukan akses masyarakat terhadap bantuan perbaikan hunian. Masyarakat dengan kepemilikan yang jelas lebih mudah memperoleh bantuan, sementara yang belum memiliki legalitas cenderung terhambat. Selain itu, sistem SIRUBAH dan peran kelurahan membantu

memastikan proses verifikasi berjalan transparan dan tepat sasaran. Keamanan kepemilikan tanah berpengaruh besar terhadap efektivitas penanganan permukiman kumuh, baik dalam aspek sosial berupa rasa aman dan stabilitas, maupun aspek ekonomi melalui peningkatan nilai aset dan dorongan investasi masyarakat.

B. Akses Ke Sumber Air Yang Lebih Baik (*Access to Improved Water*)

Akses terhadap air minum yang layak merupakan hak dasar manusia yang berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup, khususnya di kawasan permukiman kumuh. Air yang layak umumnya berasal dari sumber terlindungi seperti jaringan perpipaan, sumur bor, atau penampungan air hujan, dengan karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Berdasarkan indikator SDGs 11.1.1, rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum yang lebih baik apabila menggunakan sumber yang terlindungi dari kontaminasi, seperti air perpipaan, sumur terlindungi, atau air kemasan dengan sumber pendukung yang layak. Di Kelurahan Sungai Dama, sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan layanan PDAM sebagai sumber utama air bersih, yang menunjukkan bahwa akses terhadap air minum yang layak secara umum telah terpenuhi dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan, kebersihan lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat.

Meskipun demikian, pemerataan akses air bersih masih menghadapi kendala, terutama pada wilayah perbukitan yang dipengaruhi kondisi topografi sehingga distribusi air belum optimal. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat harus menggunakan sistem penampungan atau membeli air, yang berdampak pada tambahan beban ekonomi. Pemenuhan akses air bersih juga tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan memerlukan sinergi antara PDAM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, akses air bersih mencerminkan keterkaitan dimensi sosial (kesehatan dan kesejahteraan), ekonomi (biaya dan keterjangkauan), serta lingkungan (ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur distribusi, pemerataan layanan, serta koordinasi lintas sektor agar akses air bersih dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkelanjutan.

C. Akses ke Fasilitas Sanitasi Yang Lebih Baik (*Access to Improved Sanitation*)

Akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Sanitasi yang buruk, yang umumnya ditemukan di kawasan permukiman kumuh, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kontaminasi sumber air, serta meningkatkan risiko penyakit menular seperti diare. Berdasarkan indikator SDG

11.1.1, rumah tangga dikatakan memiliki sanitasi layak apabila menggunakan fasilitas yang mampu memisahkan limbah manusia secara higienis, seperti toilet yang terhubung dengan septic tank atau sistem pembuangan yang aman. Di Kelurahan Sungai Dama, sebagian besar masyarakat sebenarnya telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang cukup layak. Namun, permasalahan utama masih terletak pada pengelolaan limbah domestik, terutama pada rumah yang berada di bantaran sungai, di mana limbah masih dialirkan langsung ke sungai sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan meningkatkan beban biaya air bersih bagi masyarakat.

Melalui program penanganan kawasan permukiman kumuh, khususnya kegiatan bedah rumah oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, dilakukan upaya peningkatan kualitas sanitasi melalui penyediaan atau perbaikan fasilitas toilet di dalam rumah. Program ini memberikan dampak positif pada dimensi sosial berupa peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, serta pada dimensi lingkungan melalui pengurangan risiko pencemaran dan perbaikan pengelolaan limbah. Selain itu, terdapat keterkaitan dengan dimensi ekonomi, terutama dalam hal meningkatnya biaya yang harus ditanggung masyarakat akibat kualitas sanitasi yang belum optimal serta keterbatasan anggaran program yang mengharuskan penentuan prioritas perbaikan. Secara keseluruhan, indikator akses sanitasi ini mencerminkan keterkaitan yang kuat antara aspek sosial dan lingkungan, meskipun aspek ekonomi hadir secara tidak langsung dalam pelaksanaannya.

D. Kualitas Struktural Perumahan dan Lokasi (*Structural Quality/Durability of Dwellings*)

Kualitas struktural perumahan dan lokasi merupakan salah satu indikator penting dalam SDG 11.1.1 yang menekankan bahwa perumahan layak tidak hanya sebatas tempat tinggal, tetapi juga mencakup keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, serta akses terhadap layanan dasar. Dalam perspektif hak asasi manusia, perumahan yang layak berperan penting dalam menjamin kehidupan yang bermartabat, sekaligus mendukung aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, kondisi di Kelurahan Sungai Dama menunjukkan bahwa kualitas perumahan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penggunaan material kayu, kepadatan bangunan, serta kerentanan terhadap bencana seperti kebakaran dan banjir. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian hunian belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan oleh UN-Habitat.

Upaya pemerintah melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama pada perbaikan struktur dasar seperti atap, lantai, dan dinding, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Meskipun demikian, program ini masih memiliki keterbatasan karena sifat bantuannya yang stimulan, sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk penyempurnaan perbaikan. Selain itu, kondisi geografis wilayah turut memengaruhi pelaksanaan program.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, indikator ini mencerminkan dimensi sosial dan ekonomi melalui peningkatan kualitas hidup serta pengurangan beban biaya masyarakat, namun belum secara kuat merepresentasikan dimensi lingkungan, sehingga dikategorikan sebagai pembangunan yang bersifat *equitable*.

E. Kepadatan Hunian Yang Memadai (*Sufficient Living Area/Overcrowding*)

Kepadatan hunian merupakan salah satu indikator dalam menilai kualitas permukiman kumuh, yang ditandai oleh tingginya jumlah penghuni dalam ruang tinggal yang terbatas. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi masyarakat dan terbatasnya ketersediaan lahan, sehingga banyak keluarga harus tinggal bersama dalam satu rumah dengan kapasitas ruang yang tidak memadai. Menurut standar UN-Habitat, hunian dikatakan layak apabila satu ruang ditempati maksimal tiga orang, sehingga kelebihan penghuni menjadi indikator ketidaklayakan hunian dan termasuk dalam pengukuran SDGs 11.1.1. Di Kelurahan Sungai Dama, kepadatan hunian tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat, seperti menurunnya kenyamanan, kesehatan, serta meningkatnya potensi konflik akibat keterbatasan ruang privat dan tingginya intensitas interaksi sosial dalam ruang sempit.

Selain berdampak pada aspek sosial, kepadatan hunian juga berkaitan erat dengan dimensi ekonomi dan lingkungan. Secara ekonomi, keterbatasan finansial membuat masyarakat sulit mengakses hunian yang lebih layak, sehingga harus berbagi tempat tinggal dalam satu rumah. Dari sisi lingkungan, kepadatan tinggi menyebabkan pola permukiman tidak teratur, jarak antarbangunan sempit, serta meningkatkan risiko bencana seperti kebakaran dan banjir. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Sungai Dama telah membantu memperbaiki kualitas fisik bangunan, namun belum mampu mengatasi masalah kepadatan hunian secara menyeluruh karena tidak mencakup perluasan ruang atau penataan kawasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, seperti penyediaan hunian terjangkau dan penataan permukiman terpadu. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, indikator ini terutama mencerminkan dimensi sosial dan ekonomi (*equitable*), sementara dimensi lingkungan belum menjadi fokus utama dalam penilaiannya.

Faktor Kendala Pembangunan Keberlanjutan Pada Pelaksanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pembangunan keberlanjutan pada pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh. Pencapaian program sangat bergantung pada alokasi anggaran yang disesuaikan dengan prioritas pemerintah daerah, sehingga tidak seluruh usulan perbaikan rumah maupun fasilitas pendukung dapat diakomodasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara maksimal karena kebutuhan di lapangan cenderung lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah. Akibatnya, beberapa kebutuhan penanganan permukiman kumuh masih belum dapat direalisasikan secara menyeluruh.
2. Kendala dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh disebabkan oleh perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Selain itu, akses jalan yang sempit dan lokasi yang relatif terpencil menyebabkan proses pengangkutan material harus dilakukan secara manual. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya operasional, bertambahnya waktu pelaksanaan, serta risiko kehilangan material bangunan di lapangan.
3. Dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, masih terdapat masyarakat yang kurang kooperatif, seperti menolak relokasi sementara selama proses perbaikan berlangsung serta merasa nyaman dengan kondisi hunian yang ada. Selain itu, muncul kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak menerima bantuan, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait prosedur dan mekanisme program yang dilaksanakan.
4. Hambatan dalam verifikasi legalitas mengenai masih ditemukan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dokumen kepemilikan rumah yang menjadi syarat penerima bantuan, seperti tidak adanya sertifikat kepemilikan resmi dan status hunian yang belum sesuai dengan ketentuan program. Selain itu, perubahan status penerima bantuan, seperti meninggal dunia saat program berlangsung, serta kehilangan dokumen akibat bencana seperti kebakaran, turut menjadi kendala dalam proses verifikasi, validasi, dan penyesuaian administrasi program.

Dengan mengatasi berbagai kendala tersebut, pembangunan keberlanjutan pada pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling dapat dioptimalkan untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta meningkatkan kualitas permukiman masyarakat agar menjadi lebih layak.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Dama Kawasan Steling dinilai belum optimal, terutama pada indikator akses air

bersih, kepadatan hunian, dan kualitas struktural permukiman yang masih padat dan tidak teratur. Meskipun demikian, beberapa indikator seperti keamanan kepemilikan tanah dan akses sanitasi menunjukkan capaian yang cukup baik. Analisis menggunakan indikator UN-Habitat menunjukkan bahwa tidak semua aspek memenuhi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi, dan lingkungan) secara seimbang, di mana sebagian indikator hanya mencerminkan dua dimensi (*equitable*) dan sebagian lainnya telah memenuhi ketiga dimensi (*sustainable*). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan masih belum menyentuh seluruh aspek secara menyeluruh, khususnya pada dimensi lingkungan. Selain itu, pelaksanaan program juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kendala teknis di lapangan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta permasalahan administratif terkait legalitas kepemilikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terpadu dan berkelanjutan agar seluruh dimensi pembangunan dapat terpenuhi secara optimal.

Saran

Pembangunan berkelanjutan pada aspek keamanan kepemilikan masih belum sepenuhnya memenuhi dimensi lingkungan, sehingga diperlukan integrasi antara legalitas kepemilikan dan penataan lingkungan untuk meningkatkan kualitas permukiman. Selain itu, pada indikator kualitas struktural perumahan dan lokasi, aspek lingkungan perlu diperkuat melalui penggunaan material ramah lingkungan dan penyesuaian dengan kondisi geografis. Dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh juga diperlukan peningkatan anggaran, penguatan manajemen teknis, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan administrasi kepemilikan. Selanjutnya, penelitian mendatang disarankan memperdalam kajian pada indikator yang belum memenuhi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan dengan menambahkan aspek lingkungan seperti kerentanan bencana, tata ruang, dan daya dukung lingkungan.

Daftar Pustaka

- Agus S Sadana. (2014). *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Graha Ilmu.
- Haryanti, S., Ali, K., Ismail, A. M. I., Suarlin, & Haruna, M. (2024). *Administrasi Pembangunan*. CV. Media Sains Indonesia.
- Hidayat, H. (2021). *Studi penanganan kawasan permukiman kumuh di kelurahan sri meranti kota pekanbaru*. 1–227. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9399>
- Joenso, R. C., & Sari, S. R. (2020). *KLASIFIKASI KEKUMUHAN DAN KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus : Permukiman Lampu Satu , Merauke)*.
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta.

- Desa-Kota*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Laporan Pengurangan Kumuh Tahun 2020-2024. (2024).
- Marlina. (2025). *Strategi Mitigasi Permasalahan Permukiman Kumuh Untuk Mendukung Tercapaian SDGS Tujuan 11 SDGS Tentang Kota Dan Permukiman Yang*. 4(2), 447–459.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publication Inc.
- Nurchaya, Y. (2025). *Konsep Modifikasi untuk Rumah Berkelanjutan Di Permukiman Informal Perkotaan : Systematic Literature Review*. 1(1), 52–66.
- Ponto, G. D., Pangemanan, S. E., & Kasenda, V. (2022). Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Singkil Kota Manado (Studi Kasus di Kelurahan Kombos Timur). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–14.
- Purba, B. R., Dhea, T., Purba, F., Rosni, S., Laia, A., Haggata, F., & Sirait, K. D. (2025). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. 4(2), 8569–8574.
- Putri, K., Ridlo, M. A., & Widyasamratri, H. (2023). Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 104. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22909>
- Rahadian, A. H. (2016). *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. III(01).
- Rahardjo, P., & Nuzzela, S. (2021). *INTERAKSI SOSIAL ANTARA WARGA PERMUKIMAN REAL ESTAT DENGAN PENDUDUK DI SEKITAR NYA*. 5(2), 311–324.
- Rahayu, I., & Jaharuddin, W. A. (2020). Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Sekitar Taman Maccini Sombala Kota Makassar. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 14(2), 187–194. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v14i2.14433>
- Rosana, M. (2018). *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia*. 1(1), 148–163.
- Sartika, D., Nurhalisyah, E., Islam, M., & Deswara, M. I. (2025). *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia*. 1(2), 65–73.
- Setiawan, F. (2019). *PENGARUH TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KE -3 DALAM*. 8(2), 59–69.
- Subandi, M., Suryawati, D., & Widnyani, P. S. (2025). *Manajemen Administrasi Pembangunan*. Widina Media Utama.
- United Nation. (2018). Indicator category : Tier I [11.3.1]. *UN-Habitat for a Better Urban Future, March*, 1–12.
- Zahra, N. A., & Yulyana, E. (2025). *STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH OLEH DINAS PERUMAHAN , KAWASAN (Studi Kasus pada Kelurahan Medan Satria)*. 11, 42–62.